

Persepsi Masyarakat Kota Makassar Terhadap Ulama Dalam Keterlibatan Politik Praktis

Muhammadong¹, Saharullah²

Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar

Email: azis@unm.ac.id¹, Juanda.unm@gmail.com²

Abstrak. Keterlibatan ulama dalam politik praktis menuai pro dan kontra. Pandangan yang pro menganggap bahwa ulama harus memberi kontribusi bukan hanya dalam bidang dakwah akan tetapi harus terjun dalam dunia politik untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Pandangan yang kontra menganggap bahwa ulama dalam memperjuangkan kemaslahatan harus konsisten pada jalurnya melalui jalan dakwah dan agama sehingga dapat dikenali ciri khasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kota Makassar selalu mempersepsikan ulama sebagai pengayom. Sehingga keterlibatannya dalam dunia politik tidak dipersoalkan demi mewujudkan kebaikan bersama selalu komitmen tersebut dipertahankan dan tidak diwarnai dengan kepentingan yang dapat merugikan. Masyarakat menganggap bahwa perjuangannya ulama selalu berada pada jalur kebenaran sehingga keterlibatannya dalam berbagai bidang selalu berorientasi pada kebenaran.

Kata Kunci : politik praktis, dakwah, ulama

Abstract. The involvement of ulama in practical politics reaps the pros and cons. The pro-view assumes that the ulama must contribute not only in the field of da'wah but must also be absorbed in the world of politics to realize the benefit of society. The contradictory view assumes that the ulama in the fight for the benefit must be consistent in its path through the way of da'wah and religion so that it can be identified by its characteristics. The results showed that the people of Makassar City always perceive scholars as protectors. So that his involvement in the political world is not questioned in order to realize the common good always that commitment is maintained and not colored by interests that can be detrimental. Society considers that the struggle of the ulema is always on the path of truth so that its involvement in various fields is always oriented to truth.

Keywords: practical politics, da'wah, scholars

PENDAHULUAN

Ulama, pada dasarnya, merupakan suatu pengertian dalam konsep sosial. Oleh karena itu, penelusuran lebih lanjut konsep ulama akan merujuk pada pengertian tentang seorang yang menguasai ilmu pengetahuan. (Ali Haedar, 1994). Ulama merupakan orang-orang yang mengerti atau orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang berpengetahuan. Pada umumnya, masyarakat Islam Indonesia mengartikan ulama sebagai seorang yang berilmu baik ilmu agama maupun ilmu lainnya. Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa ulama adalah mereka yang mengetahui ilmu pengetahuan umum yang berangkat dari pengetahuan keagamaan atau kitab suci. Dalam perkembangannya, pengertian ulama mengalami penyempitan makna karena ulama hanya dipahami sebagai orang-orang yang mempunyai keterlibatan dalam pengetahuan agama saja. (Muhammad Tholhah, 2005)

Dalam konteks dengan lingkungan masyarakat Islam, ulama sering diidentifikasi kepada pemahaman sebagai ahli waris para Nabi. Pengidentifikasi ini mengacu kepada fungsi ulama sebagai pelanjut dan pengemban risalah kenabian yang disampaikan kepada umat manusia. (Yusdani, 2016). Atas dasar kedudukan yang ditempati ulama itu, mereka ditempatkan pada

hierarki teratas dalam struktur sosial masyarakat Islam. Status keulamaan bisa disandang oleh siapa saja dalam masyarakat Islam. Mereka yang telah memiliki pengetahuan agama sampai suatu ukuran tertentu yang telah umum diterima orang dapat dikatakan sebagai Ulama meskipun martabat dan pengaruhnya terhadap masyarakat tergantung dari kesalahan perseorangan dan pengabdianya. (Ford Richard, Thompson, 2005)

Berbagai gelar yang diperuntukkan kepada Ulama biasa disebut dengan wali yaitu orang yang mempunyai keilmuan yang sangat tinggi dan mempunyai kepribadian yang luar biasa. Gelar lainnya adalah panembahan, yang diberikan kepada ulama yang lebih di tekankan pada aspek spiritual, juga menyangkut segi kesenioran, baik segi usia maupun nasab (keturunan). Hal ini menunjukkan bahwa sang ulama tersebut mempunyai kekuatan spiritual yang tinggi. (Amin Rais, 1987)

Terlepas dari makna ulama tersebut maka yang dimaksud ulama dalam artikel ini adalah mereka yang mempunyai keahlian dalam bidang keilmuan Islam dan dengan konsisten mengamalkan ilmunya itu, sehingga mendapat pengakuan dari masyarakat Muslim secara luas. (Dawam Raharjo, M., 1991). Dengan demikian, keulamaan tidak semata-mata gelar keilmuan, tetapi juga melalui pembuktian nyata yang diwujudkan dengan sikap dan tingkah laku, sehingga mereka

dapat menjadi mediator dalam memecahkan persoalan-persoalan yang di hadapi oleh umat Islam. Perannya dalam masyarakat inilah yang menjadikan dirinya disebut ulama. (Pulungan, Suyuti, 1999). Namun, paling tidak, ada dua hal sebagai syarat minimal seseorang dapat disebut ulama yaitu mempunyai keilmuan yang tinggi setelah dia menempuh belajar yang cukup lama, dan pengakuan masyarakat akan ketaatannya terhadap ajaran Islam yang di buktikan dengan perbuatan nyata. (Abdurrahman, 2009.)

Diantara keterlibatan ulama yang diharapkan adalah mereka harus selalu siap untuk memimpin, baik dalam hal peribadatan agama maupun pemikiran keagamaan. Mereka juga sebagai penuntun spiritual, pemimpin ritual keagamaan, dan pemimpin masyarakat. (Greg Fealy, 2011). Ulama juga merupakan tempat "mengadu" bagi masyarakatnya. Orang datang kepadanya, bukan hanya mencari jawaban terhadap masalah-masalah hukum agama dalam arti sempit saja, tetapi juga memperoleh jawaban dan pemecahan masalah keseharian mereka, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat. Bahkan, dahulu, adapula orang yang datang untuk mencari obat penyembuh sakit. Karena keyakinan dan keikhlasan para ulama, maka fatwa ulama di terima sebagai sebuah fatwa yang final yang tidak di pertanyakan lagi. (Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, 2001).

Persepsi masyarakat terhadap ulama sangat variatif. Ada yang memberi penilaian positif tetap ada juga yang memberi penilaian negatif, tergantung hasil kerja yang telah dicapai oleh Ulama. Namun pada dasarnya, masyarakat di Kota Makassar sangat menaruh harapan besar keberadaan Ulama kerana mereka dianggap sebagai pengayom dalam kehidupan mereka. Ulama dipersepsikan sebagai pemberi solusi terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Sehingga apapun keterlibatannya selalu mendapat dukungan dari mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini diakukan di di Unit Kementerian Agama Kota Makassar. Dilihat dari jenis penelitian, maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Karena permasalahan yang diteliti bersifat fenomenologis yaitu melihat partisipasi Ulama dalam politik praktis. Keberadaan Ulama sebagai obyek dalam penelitian ini untuk melihat sejauh mana persepsi masyarakat terhadap Ulama dalam kegiatan politik praktis di Kota Makassar. Data yang dikumpulkan dijadikan dasar untuk menggali tentang persepsi masyarakat terhadap

Ulama dalam keterlibatannya dalam politik praktis.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini keterlibatan ulama dalam politik praktis sehingga dapat dipersepsikan oleh masyarakat terhadap kinerja yang dicapai. Pertimbangan utama dan menjadi dasar yang diambil dalam penelitian ini adalah dampak yang ditimbulkan dari kinerja Ulama supaya dapat dijadikan sebagai dasar dalam mempersepsikannya.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, sehingga menuntut peran serta peneliti secara aktif. Agar data yang diperoleh lebih fokus, maka dibuatkan Jadwal kegiatan penelitian yang didalamnya memuat alokasi waktu terhadap persoalan yang diteliti. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan. Instrumen tersebut diharapkan dapat menjadi alat kontrol terhadap pelaksanaan penelitian, apakah informasi yang diperoleh sudah cukup atau belum.

Untuk memudahkan memperoleh data dilapangan, maka dibuatkan pedoman wawancara supaya dapat memberikan petunjuk dan kemudahan bagi peneliti, sehingga wawancara tidak keluar dari fokus penelitian dan disusun berdasarkan indikator-indikator penelitian. Kemudian dibuat lebih operasional dengan menyusun pertanyaan-pertanyaan sederhana dan obyektif, agar informan tidak memberikan interpretasi lain selain yang menjadi tujuan dari pertanyaan tersebut. sehingga data yang diperoleh melalui wawancara atau observasi merupakan hasil gabungan antara kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya, yang dilakukan secara sadar, terarah, dan senantiasa bertujuan memperoleh informasi yang dilakukan. Hal ini dilakukan dengan cara langsung turun ke lokasi penelitian dengan melakukan pengamatan dengan informan yang telah ditetapkan.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan observasi kepada masyarakat supaya dapat menerima informasi secara langsung sehingga tidak dibutuhkan informasi lain. Observasi dimaksudkan supaya mendapatkan informasi dalam kaitannya dengan konteks, sehingga diperoleh makna dari informasi yang dikumpulkan. Disamping itu, dilakukan in-depth interview terhadap masyarakat dan ulama untuk dapat mengetahui kategori persepsi. Teknik wawancara dengan cara seperti ini, membuat informasi lebih akurat karena mendapatkan informasi langsung dari responden atau informan. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengumpulkan informasi bukan untuk mengubah atau mempengaruhi pendapat responden.

Dalam melakukan teknik analisis data, digunakan tiga cara, yaitu: 1). Mereduksi data yaitu dilakukan dengan pemilahan, pemusatan perhatian

dan penyerderhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data telah terekam dan tertulis dari lapangan. Reduksi data berlangsung selama pengumpulan data dan berlanjut terus selama penelitian berlangsung, bahkan ketika laporan akhir telah disusun secara lengkap. 2). Penyajian data dilakukan dengan cara dikelompokkan berdasarkan fokus masalah penelitian, disederhanakan dan dikonstruksi sedemikian rupa supaya dapat diinterpretasi. Display data merupakan sekumpulan informasi yang memberikan kemudahan penarikan kesimpulan dan pengembangan interpretasi. 3). Verifikasi data dilakukan dengan tujuan untuk mencari makna terhadap data yang dikumpulkan, dengan mencari pola hubungan, persamaan berbagai informasi yang berkenaan dengan fokus masalah. Pada awalnya dilakukan berbagai kesimpulan sementara dan sebagainya daripada kesimpulan itu berubah karena adanya fakta-fakta baru yang diperoleh. Setelah itu dibuat kesimpulan baru yang dinilai kredibel untuk dirangkai dalam pembahasan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi ulama di Kota Makassar sangat diakui karena kedekatannya dengan masyarakat. Ulama selalu dipersepsikan dalam keterlibatannya dalam politik praktis pada dua hal yaitu positif dan negatif tergantung kinerja yang dicapai. Harapan masyarakat terhadap ulama sangat tinggi oleh karena ulama selalu dianggap sebagai pemberi solusi dalam berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Sehingga ketika ulama terjun dalam dunia politik masyarakat menganggapnya sebagai hal yang wajar bahkan tidak sedikit yang memberi dorongan dengan harapan ulama tersebut dapat memberi perbaikan kepada mereka.

Hanya saja tidak dapat dipungkiri bahwa antara ulama dengan masyarakat sering ditemukan kesenjangan. Agaknya banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara ulama dengan masyarakat. Faktor faktor tersebut tidak disebabkan oleh satu pihak saja, tetapi saling terkait, yang semuanya dapat di simpulkan dalam satu formula, yakni lajunya perkembangan masyarakat yang tidak terkejar. Masyarakat selalu menuntut kepada ulama supaya dapat membawa perubahan kearah yang lebih baik supaya tarap hidup mereka lebih baik dan lebih maju. Masyarakat tidak selalu mempersepsikan ulama sebagai juru dakwah saja tetapi juga sebagai pencari alternatif baru bagi pemecah problem sosial dan ekonomi, khususnya jika alternatif tersebut bertentangan dengan ajaran agama.

Persepsi masyarakat terhadap ulama selalu berorientasi pada perbaikan tarap hidup mereka

sekalipun ulama tidak secara langsung terjun dalam urusan pemerintahan dan politik, namun setidaknya dapat memberikan masukan bagi pemerintah sehingga hak-hak masyarakat tidak terabaikan. Masyarakat selalu menganggap bahwa ulama selalu murni perjuangannya tanpa dicampuri unsur politik. Sehingga keterlibatan ulama dalam dunia politik merupakan dinamika yang harus dipersepsikan sebagai jalan untuk merubah tarap hidup masyarakat.

Masyarakat selalu mempersepsikan bahwa tugas utama seorang ulama adalah sebagai pewaris Nabi. Hanya saja penjabaran tugas tersebut dapat diimplemetasikan dalam dunia politik dan tugas-tugas lain yang dapat membawa kebaikan bagi masyarakat. Hasil yang ditemukan setidaknya ada empat tugas dari ulama, yaitu menyampaikan dakwah. Tugas ini merupakan skala prioritas dan ciri khas sebagai ulama. Tujuan yang ingin dicapai dari tugas tersebut supaya masyarakat dapat menjalankan agamanya dengan baik sehingga dapat hidup lebih tenang. Tugas kedua dari ulama adalah menjelaskan ajaran Islam berdasarkan ayat Alquran supaya masyarakat dapat menjadi generasi Rabbani dan taat menjalankan agamanya serta menolak mudarat. Tugas ini adalah menjalankan fungsi Alquran sebagai pedoman dalam kehidupan manusia supaya mereka tidak salah jalan. Tugas ketiga dari ulama yang dipersepsikan masyarakat adalah menjadi problem solving terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Kehadiran ulama dalam politik praktis tidak pernah dipersolakan masyarakat karena ulama selalu dipercaya dapat memberi perubahan dalam hidup mereka. Masyarakat tidak pernah alergi dengan kehadiran ulama dalam politik praktis karena mereka menganggap bahwa politik merupakan jalan untuk meraih tujuan. Adapun tugas keempat dari ulama yang dipersepsikan masyarakat adalah dapat menjadi teladan dalam hidup mereka. Ulama selalu disegani masyarakat bukan karena jabatan dan kedudukannya akan tetapi karena kewibawaan yang dimiliki yang tidak dimiliki yang lain.

Di lihat dari segi fungsi, sosok ulama di Kota Makassar terbagi dalam dua kelompok. Kategori pertama adalah kelompok ulama bebas atau ulama yang kedudukan peran sosialnya berada di jalur al-da'wah wa al-tarbiyah. Tugas utama dari ulama kategori ini adalah guru atau pengajar dan sekalipun sebagai muballigh. Pekerjaan ini tidak lain merupakan usaha untuk memahamkan Islam kepada masyarakat. Melalui kegiatan pendidikan dan penyiaran agama Islam, mereka membangun masyarakatnya menganut sistem sosial yang struktur dan kultur sosialnya bercorak keislaman. Mereka tidak digaji sebagai pegawai karena komitmen mereka semata karena pengabdian. Kategori kedua, adalah kelompok ulama pejabat

atau yang di sebut dengan penghulu. Oleh karena itu, lembaga ke penghulu dibentuk dan sudah ada sejak lama. Hal inilah secara berangsur-angsur, penghulu masuk dalam sistem pemerintahan sebagai kepala suatu bagian pemerintahan yang khusus. Kelompok ulama seperti ini mempunyai kedudukan atau peran sosial keagamaannya berada di jalur al-tasyri' wa al-qadla.dengan kata lain, kelompok ulama kepenghulu mempunyai peran utama sebagai pelaksanaan bidang kehakiman yang menyangkut hukum (syariat) Islam.

Kedua kelompok ulama tersebut, pada dasarnya, mempunyai peran dalam menyemai Islam melalui jalur kependidikan Islam disamping adanya ulama yang terjung melalui jalur birokrasi. Namun, dalam perjalanan sejarah, adakalanya kedua kelompok ini tidak saling mendukung. Hal ini, antara lain, disebabkan oleh pengaruh-pengaruh luar yang sangat kuat menekan ulama. Namun di Kota Makassar, kedua model ulama tersebut selalu berjalan secara harmonis karena adanya tujuan yang sama yaitu menyatukan umat melalui berbagai metode.

Pada umumnya, antara kedua kelompok ulama di atas terdapat hubungan emosional yang sangat mendalam. Hubungan ini bisa di ikat dengan kekerabatan atau keturunan hubungan almamater berasal dari pesantren atau berguru pada kiai yang sama, atau karena di ikat oleh organisasi yang sama. Namun demikian, ulama tersebut mempunyai jaringan yang luas. Bahkan, jaringan ini tidak hanya terbatas di wilayah Makassar tetapi menjangkau keseluruhan propinsi Sulawesi Selatan bahkan di selutruh wilayah Nusantara. Dengan demikian, mereka dapat menjalin komunikasi dengan baik di antara mereka, baik masalah-masalah keagamaan maupun sosial politik.

Ulama selalu menyadari kedudukannya sebagai pewaris para nabi, mereka berkewajiban untuk terlibat secara langsung dalam pembangunan, bukan hanya terbatas dalam memberikan nasehat dan fatwa, tetapi juga keterlibatan dalam bidang bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta menilai baik buruknya dampak yang diberikannya berdasarkan nilai nilai yang diamanahkan.

Oleh karna itu ulama diharapkan dapat menjadi mitra bagi pemerintah dalam mewujudkan pembangunan. Antara pemerintah dan ulama setidaknya dapat saling mengisi dalam mewujudkan perbaikan demi kemaslahatan masyarakat. Kesenjangan juga seharusnya tidak terjadi bila ulam dalam mengadakan pengawasan bersikap atas dasar pertimbangan al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahiy 'an al-munkar, atau bila pemerintah, dalam menuntut dukungan atas kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka melalui argumentasi-argumentasi agama, bertindak dalam batas-batas "kewajaran". Walaupun memang

harus di akui bahwa penilaian tentang "kewajaran" sering kali di perselisihkan oleh kedua belah pihak, bahkan antar umat sendiri, sehinggah di kalangan ulama muncul kelompok kompromistis dan kelompok-kelompok isolasionistis.

KESIMPULAN

Persepsi masyarakat terhadap ulama dalam keterlibatannya pada politik praktis sangat variatif. Munculnya pro kontra tersebut karena eksistensi ulama sebagai pengayom harus mewarnai semua golongan tanpa diskriminatif dan kepentingan. Seakan memberi pemahaman bahwa keterlibatan ulama dalam politik praktis akan memunculkan keberpihakan demi untuk meraih kepentingan. Namun, pada dasarnya masyarakat di Kota Makassar sangat responsif terhadap ulama dalam mengambil bagian pada politik praktis. Masyarakat selalu menganggap bahwa keterlibatan ulama dalam politik praktis akan memunculkan warna baru dalam sistem perpolitikan. Keterlibatan ulama dalam politik praktis diharapkan dapat memberi sumbangsi dalam mewujudkan pembangunan. Sehingga ulama diharapkan dapat menjadi mitra bagi pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 2009. *Fenomena Kiai dalam Dinamika Politik : Antara Gerakan Moral dan Politik*. Jurnal Karsa. Vol. XV No. 1.
- Fealy, Greg. 2011, *Ijtihad Politik Ulama, Sejarah NU 1952-1967*, Yogyakarta: LKIS.
- Haedar Ali. 1994. *Nahdhatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fiqh Dalam Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Machendrawaty, Nanih dan Agus Ahmad Safei, 2001. *Pengembangan Masyarakat Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pulungan, Suyuti, 1999. *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tholhah, Muhammad, 2005. *Ahlussunnah wal jamaah dalam persepsi dan tradisi NU* (Jakarta: Lantabora).
- Rais, Amin. 1987, *Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta*, Jakarta: Mizan Pustaka.
- Raharjo, M. Dawam, 1991. *Intelektual Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa*, Bandung: Mizan.
- Richard, Thompson Ford, 2005. *Political Identity as identity Politics*. Harvard Unbound, Vol 01, No. 53.
- Yusdani, 2016. *Konfigurasi Pemikiran Politik Islam: Antara Tradisi dan Liberasi*: Yogyakarta, Rona.